

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kemiskinan terjadi disemua negara baik yang maju maupun berkembang. Bagi negara berkembang kemiskinan merupakan permasalahan yang serius, hal ini karena kemiskinan berdampak kepada pembangunan suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik, disatu sisi kemiskinan membuat permasalahan sosial lainnya muncul dari kejahatan pencurian, perampokan, dan lain-lain.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai permasalahan serius terkait kemiskinan. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan haruslah maksimal untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dalam prosesnya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah untuk membuat kemiskinan menjadi turun.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan Indonesia mengalami perkembangan yang membaik walaupun pada saat bersamaan kemiskinan masih tergolong tinggi. Kebijakan pemerintah dalam hal ini berpengaruh untuk menentukan bagaimana kemiskinan dapat mengalami perubahan yang lebih baik. Diketahui pada tahun 2019 di Indonesia kemiskinan terjadi sebanyak 24,97 persen, sebelumnya pada tahun 2018 kemiskinan sebanyak 25,67 persen, kemudian pada tahun 2017 menjadi 26,58 persen dan tahun 2016 sebanyak 27,77 persen.

Kemiskinan seringkali mengacu kepada pendapatan yang rendah, pendidikan yang rendah hingga akhirnya membuat sumber daya yang ada juga rendah. Acuan tersebut merupakan sebuah upaya dari melihat bagaimana kemiskinan terjadi dan sebagai langkah untuk membuat kemiskinan menjadi dapat tertangani dengan baik, walaupun dalam hal ini memerlukan upaya dan waktu yang tidak sedikit tetapi perlu untuk terus dilakukan. Kemiskinan pada permasalahan ini dipandang sebagai masalah yang menyebabkan perekonomian tidak dapat berkembang dengan baik.

Perekonomian yang tumbuh dengan baik dalam hal ini dapat membuat suatu masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi tersebut haruslah diwujudkan dengan melakukan beberapa kebijakan dan dari masyarakat sendiri berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari sektor formal maupun sektor non formal. Pengertian sektor informal umumnya merupakan sebagai usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas serta sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Keberadaan sektor informal tersebut membuat perekonomian kerakyatan dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan sehingga dapat diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi, hal ini ditandai dengan sektor informal dapat menjadi penampung dan alternatif peluang kerja.

Sektor informal di Indonesia memiliki potensi besar salah satunya yaitu sektor UMKM. Peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional memiliki peran yang sangat penting, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan

ekonomi. Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada periode 1997 – 1998 UMKM mampu berdiri kokoh.

Data badan pusat statistik memperlihatkan, setelah krisis ekonomi di tahun 1997 – 1998 jumlah UMKM terus meningkat, serta mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Jumlah pengusaha Indonesia sebanyak 56.539.560 unit, pada tahun tersebut. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99%. Sisanya sekitar 4.968 unit atau 0.01% adalah usaha besar. Data membuktikan UMKM merupakan pasar yang potensial bagi industri jasa keuangan, terutama pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan, karena sekitar 60 – 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. (Hartati 2017)

Permasalahan tersebut membuka mata pemerintah untuk memberikan perhatian lebih banyak terhadap bisnis berskala kecil, mikro dan menengah. Dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Gerak UMKM menjadi semakin leluasa dengan keberadaan payung hukum tersebut. Permasalahan dalam akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai teratasi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 dan 8 UU Nomor 20 Tahun 2008 salah satu penugasan pemerintah dan pemerintah daerah adalah menumbuhkan iklim usaha salah satunya melalui pemberian bantuan dana dan fasilitas. Karena dalam peraturan tersebut tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank. (UU No. 20 Tahun 2008) Hal ini didukung oleh bank sentral yang telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pemberian kredit

oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Pada pasal 2 PBI nomor 12/22/PBI/2012 mengamanatkan kepada pihak bank agar ditahun 2015 memberikan porsi kredit sekurang-kurangnya 5% kepada pelaku UMKM dari total kredit atau pembiayaan yang dikucurkan. Bahkan ditahun 2018 rasio kredit atau pembiayaan terhadap UMKM ditetapkan paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. (Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012)

Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 7 dan 8 mengamanatkan supaya pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM, salah satunya melalui aspek pendanaan, hal ini bertujuan memperluas, memberikan kemudahan dan membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan sumber pendanaan dan fasilitas yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (UU No. 20 Tahun 2008)

Bentuk perhatian pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha bagi UMKM salah satunya dengan meluncurkan program dana bergulir. Upaya pemberian dana bergulir diharapkan dapat membuat aksesibilitas terhadap permodalan di masyarakat menjadi lebih mudah serta dari pelaku usaha dapat mendapatkan perlindungan dalam mengembangkan usahanya, sehingga dari hal tersebut kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang UMKM dapat lebih terjamin.

Kota Semarang merupakan salah satu pemerintah daerah yang menjalankan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro dengan melakukan kerjasama kepada bank yang ditunjuk oleh Walikota dengan bunga yang lunak dan proses pembayarannya dilakukan dengan mengangsur sehingga dapat digulirkan kepada koperasi dan usaha mikro yang lain. (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016)

Pengertian bergulir dapat dipahami bahwasanya dana yang dipinjamkan kepada pelaku usaha merupakan dana yang diputar dari pihak bank kemudian ke pelaku usaha yang meminjam. Pelaku usaha yang meminjam kemudian membayarkan angsuran atau cicilan ke pihak bank dan dana angsuran atau cicilan tersebut kemudian kembali dipinjamkan kepada pelaku usaha yang lain, sehingga dari dana tersebut memerlukan kepatuhan pembayaran oleh pelaku usaha agar dana yang ada dapat dinikmati lebih banyak pelaku usaha yang lain.

Pasal 2 pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tujuan keberadaan dana bergulir yaitu meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro dari segi permodalan, kemudian meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro sebagai potensi ekonomi kerakyatan, serta memberikan dukungan dan semangat agar masyarakat hidup berwirausaha tanpa keberadaan permasalahan khususnya di bidang permodalan. (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016)

Ayat 3 pasal 2 pada Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 menyebutkan sasaran pemberian dana bergulir adalah masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro, dalam hal ini penulis hanya memfokuskan penelitian pada Usaha Mikro bertujuan supaya batasan penelitian tidak terlalu lebar dan mampu memperdalam fokus masalah dalam lingkup sasaran Usaha Mikro. (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016)

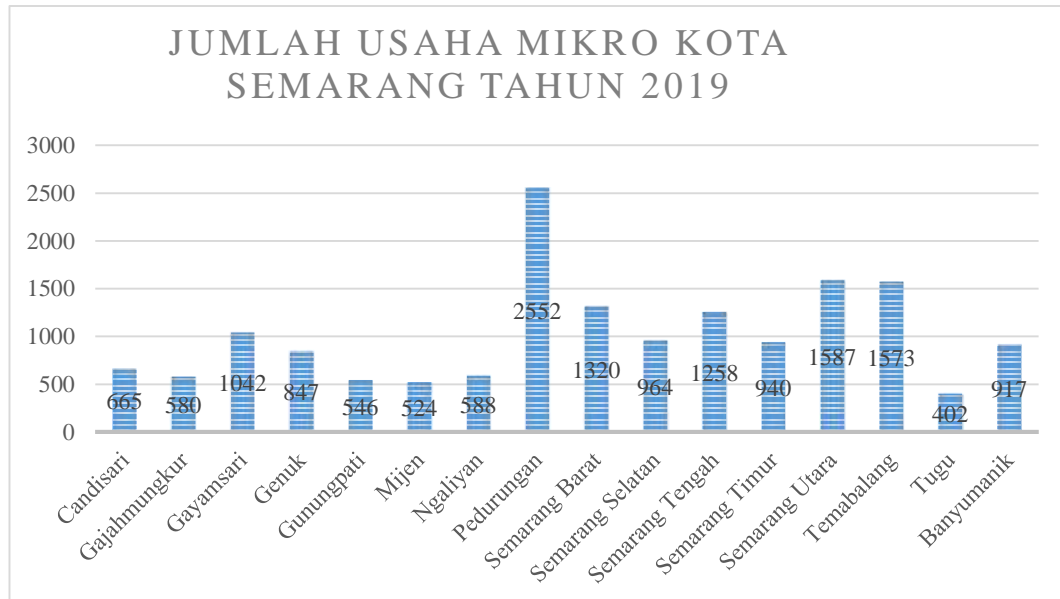
Kredit WIBAWA (Wirausaha Bangkit Jadi Jawara) merupakan bentuk dana bergulir yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kredit WIBAWA diluncurkan pada tahun 2017 dengan mempunyai ciri khas bunga yang rendah sebesar 3 persen per tahun serta pembebasan agunan atau jaminan bagi pelaku usaha peminjam dana maksimal sebesar 5 juta, sedangkan selebihnya harus melalui jaminan dengan maksimal pinjam 50 juta. Tahun sebelumnya (2016) Pemerintah Jawa Tengah juga meluncurkan pinjaman bagi usaha rakyat dengan skema yang berbeda yakni maksimal 2 juta untuk bunga sebesar 2 persen per tahun dan maksimal 25 juta dengan bunga 7 persen per tahun, hal ini membuat kredit WIBAWA dirasa lebih menguntungkan karena dari sisi bunga lebih rendah. (Kompas.com 2017)

Kota Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah yang memiliki begitu banyak potensi, dari segi geografinya saja berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah sekaligus merupakan salah satu dari lima besar kota metropolitan di Indonesia bersama Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Maka tidak dapat dipungkiri kota

Semarang memiliki peran strategis dalam pengembangan usaha mikro, berikut disajikan gambaran jumlah pelaku usaha mikro di Kota Semarang.

Gambar 1.1

Jumlah Usaha Mikro Kota Semarang di Tiap Kecamatan



Sumber: Diolah dari iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/. 2020

Berdasarkan Gambar 1.1, Data dari web iumk.semarangkota.go.id, tertanggal 31 Desember 2019 jumlah usaha mikro yang telah terdaftar sebesar 16.302 unit. Kecamatan dengan jumlah usaha mikro terbesar berada di kecamatan Pedurungan dengan jumlah 2.552 unit. Harapan pemerintah dan pemerintah daerah dengan banyaknya usaha mikro yang ada disuatu wilayah akan menciptakan dampak positif yang besar. Harapan tersebut diupayakan oleh pemerintah dengan bentuk memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro dengan diciptakannya Peraturan Walikota nomor 42 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro di Kota Semarang hadir sebagai

landasan hukum pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan potensi usaha mikro melalui program kredit WIBAWA.

Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kota Semarang menjelaskan bahwa pemerintah daerah menganggarkan pinjaman dana bergulir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dianggarkan dalam anggaran kelompok belanja tidak langsung serta merupakan investasi non-permanen jangka panjang. Sejak program kredit WIBAWA diluncurkan pada tahun 2017 anggaran pemerintah Kota Semarang menyalurkan anggaran melalui bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh walikota yakni PD BPR Bank Pasar Kota Semarang. (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016)

Harapan pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat sebagai pelaku usaha mikro mampu memanfaatkan program kredit WIBAWA sebaik mungkin, namun bersumber dari data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sejak diluncurkannya program Kredit WIBAWA di Tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 respon pelaku usaha mikro yang mengajukan proposal usahanya untuk program Kredit WIBAWA masih sedikit. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Program Kredit WIBAWA di Kota Semarang

No.	Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah proposal Kredit WIBAWA masuk ke Dinas	Jumlah proposal Kredit WIBAWA tercairkan	Jumlah dana tersalur untuk Kredit WIBAWA (Rupiah)
1.	2017	14.758	846	549	3.480.500.000
2.	2018	15.731	512	507	2.934.000.000
3.	2019	16.302	496	408	3.063.000.000

Sumber: Diolah dari data diskopumkotasemarang dan iumk.semarangkota.go.id, 2020

Melihat fenomena dari ketepatan target dinilai melalui cakupan pelaksanaan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan, hal ini untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dan akan dijangkau oleh program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang telah di implementasikan, dinilai dari penggunaan ketepatan target data Tabel 1.1 menunjukkan angka perbandingan yang sangat besar antara jumlah pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha mikro yang mengakses program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. Awal program kredit WIBAWA diluncurkan tahun 2017 diketahui proposal yang masuk sebanyak 846 proposal dari 14.758 pelaku usaha mikro, tahun selanjutnya 2018 proposal yang masuk sejumlah 512 proposal dari 15.731 pelaku usaha mikro, tahun 2019 jumlah proposal yang masuk sebanyak 496 proposal dari 16.302 pelaku usaha mikro. Hal ini mengidentifikasi bahwa kelompok sasaran yang sudah dijangkau oleh program kredit WIBAWA sangat kecil, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis di lapangan memperlihatkan masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengetahui keberadaan program kredit WIBAWA.

Tabel 1.2
Perkembangan Usaha Mikro Kota Semarang di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	2017	2018	2019
1.	Candisari	568	631	665
2.	Gajahmungkur	533	561	580
3.	Gayamsari	969	1.029	1.042
4.	Genuk	749	810	847
5.	Gunungpati	513	545	546
6.	Mijen	426	487	523
7.	Ngaliyan	523	558	588
8.	Pedurungan	2.370	2.479	2.552
9.	Semarang Barat	1.114	1.225	1.320
10.	Semarang Selatan	940	959	964
11.	Semarang Tengah	1.231	1.255	1.258
12.	Semarang Timur	875	927	940
13.	Semarang Utara	1.531	1.584	1.587
14.	Tembalang	1.254	1.406	1.573
15.	Tugu	379	396	402
16.	Banyumanik	780	876	917
Total		14.758	15.731	16.302

Sumber: diolah dari iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/. 2020

Pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa secara kuantitas pelaku usaha mikro di Kota Semarang cukup banyak, akan tetapi yang perlu diperhatikan tentang pemerataan dalam pengembangan usaha mikro di tiap Kecamatan Kota Semarang. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat di tiga kecamatan yang paling banyak perkembangan para pelaku usaha mikronya, yakni Kecamatan Pedurungan ditahun 2019 mencapai 2.552 usaha mikro dengan perkembangan setiap tahun hampir 100 pelaku usaha mikro, diikuti dengan Semarang Utara 1.587, dan Tembalang 1.573. (iumk.semarangkota.go.id).

Pemanfaatan program kredit WIBAWA oleh pelaku usaha mikro jelas memiliki potensi yang sangat besar, mengingat jumlah pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan terbesar di Kota Semarang. Berikut disajikan tabel pelaku usaha mikro yang mengakses program kredit WIBAWA di setiap kecamatan di Kota Semarang.

Tabel 1.3
Respon Pelaku Usaha Mikro Pada Program Kredit WIBAWA di Setiap Kecamatan Kota Semarang

No.	Kecamatan	Proposal Kredit WIBAWA Masuk ke Dinas			Proposal Kredit WIBAWA Tercairkan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Candisari	31	13	14	22	13	9
2.	Gajahmungkur	18	5	11	15	5	8
3.	Gayamsari	104	39	71	75	38	58
4.	Genuk	13	18	11	13	18	9
5.	Gunungpati	19	14	6	13	14	7
6.	Mijen	62	58	18	23	58	10
7.	Ngaliyan	51	35	19	22	35	14
8.	Pedurungan	48	25	35	30	25	32
9.	Semarang Barat	62	20	58	52	20	54
10.	Semarang Selatan	74	22	17	52	21	16
11.	Semarang Tengah	59	24	14	43	24	15
12.	Semarang Timur	36	14	16	28	14	14
13.	Semarang Utara	132	157	134	81	157	104
14.	Tembalang	82	42	43	56	41	37
15.	Tugu	28	8	9	12	8	9
16.	Banyumanik	27	18	20	12	16	12
Total		846	512	496	549	507	408

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2020

Melihat fenomena dari ketepatan pelaksana, dari segi peran pelaku usaha mikro sangat penting sebagai salah satu pilar *good governance* dukungan terhadap program kredit WIBAWA oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan,

berdasarkan data Tabel 1.2 dan data Tabel 1.3 menunjukkan rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang mengakses dan berhasil tercairkan proposalnya dari program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan bahkan dengan jumlah pelaku usaha mikro terbanyak di Kota Semarang, hampir setiap tahun dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya peranan pelaku usaha mikro yang mendukung sangat rendah, pelaksanaan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan usaha mikro dari segi permodalan, meningkatkan peran usaha mikro sebagai potensi ekonomi kerakyatan, serta memberikan dukungan dan semangat agar masyarakat hidup berwirausaha tanpa keberadaan permasalahan khususnya di bidang permodalan, namun hal itu belum dapat terlaksana dengan baik karena dukungan peran pelaku usaha mikro belum optimal. Berikut disajikan tabel perkembangan program kredit WIBAWA dan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan.

Tabel 1.4

Jumlah Usaha Mikro Mengakses Program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No.	Tahun	Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan	Pengajuan Proposal ke Diskop-UM	Persentase Pengajuan (%)
1.	2017	2.370	48	2,025
2.	2018	2.479	25	1,008
3.	2019	2.552	35	1,37

Sumber: Diolah dari data diskopumkotasemarang dan iumk.semarangkota.go.id, 2020

Melihat fenomena dari ketepatan kebijakan, data Tabel 1.4 menunjukkan ketimpangan yang sangat besar antara jumlah pelaku usaha mikro yang ada dengan pelaku usaha mikro mengakses program kredit WIBAWA, mengidentifikasi

bahwa program kredit WIBAWA diduga belum dapat mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro dinilai dari peningkatan kemampuan segi permodalan, potensi ekonomi masyarakat dan semangat berwirausaha pelaku usaha mikro karena rendahnya angka serapan program kredit WIBAWA berimplikasi kepada tujuan program ini yang belum terlaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa proposal yang masuk masih sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan usaha mikro yang ada di Kota Semarang, tingkat perkembangan jumlah proposal Kredit WIBAWA yang tercairkan juga semakin menurun setiap tahunnya, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah usaha mikro yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019 dengan penambahan sekitar 1000-an usaha mikro, hal ini patut menjadi catatan serius mengapa pelaksanaan program Kredit WIBAWA mengalami hal tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dan isi program kredit WIBAWA belum terwujud dan terlaksana secara optimal serta terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program kredit WIBAWA.

Tabel 1.5

Proposal Kredit WIBAWA Berhasil Tercairkan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No.	Tahun	Pengajuan Proposal ke Diskop-um	Pengajuan Proposal Tercairkan	Persentase tercairkan (%)
1.	2017	48	30	62
2.	2018	25	25	100
3.	2019	35	32	91

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2020

Tabel 1.5 menunjukkan angka serapan dari pelaku usaha mikro yang mengajukan proposal kredit WIBAWA ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang selama tiga tahun berturut-turut, dapat dilihat terjadi kenaikan dan penurunan dalam persentase. Hal ini dapat dinilai melalui fenomena ketepatan lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal berkenaan dengan interaksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan BPR Bank Pasar Kota Semarang, kewenangan dimiliki Bank Pasar untuk menilai proposal pelaku usaha mikro layak dicairkan atau tidak, serta tidak ada intervensi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait mekanisme tersebut, hal ini yang menyebabkan angka persentase tercairkan berubah-ubah, sedangkan lingkungan eksternal berkenaan dengan intraksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan, mekanisme pengajuan dan pembimbingan proposal kredit WIBAWA dilakukan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Margunani, Setiawan, and Kistanti 2019) dalam jurnal yang berjudul “Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang” ditemukan bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaku usaha mikro mengakses program kredit WIBAWA / kredit perbankan, yaitu:

- a. Tingginya tingkat suku bunga
- b. Tidak memiliki tambahan angunan
- c. Tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit

- d. Prosedur dirasa cukup sulit
- e. Lemahnya manajemen keuangan
- f. Rendahnya kemampuan dalam pembukuan yang profesional

Melihat fenomena dari ketepatan proses, berkenaan dengan pemahaman, penerimaan dan kesiapan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan terkait proses Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan program kredit WIBAWA. Hal ini sesuai dengan hasil pra observasi dan wawancara di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Menurut Kasi Pengembangan, Penguatan, Perlindungan Usaha Mikro mengatakan bahwa proses sosialisasi program kredit WIBAWA belum tersampaikan ke pelaku usaha mikro secara keseluruhan, hal ini dirasa dapat mempengaruhi proses pemahaman, penerimaan dan kesiapan dari para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan.

Setiap pelaksanaan program tentunya tidak akan berjalan mulus begitu saja, pasti terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, begitu pun dengan program kredit WIBAWA, meskipun tujuannya adalah meningkatkan peran usaha mikro sebagai potensi ekonomi kerakyatan, serta memberikan dukungan dan semangat agar masyarakat hidup berwirausaha tanpa keberadaan permasalahan khususnya di bidang permodalan tetapi persentase usaha mikro terhadap program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan masih saja rendah.

Dikutip dari (youtube.com 2017) sebuah video wawancara dengan judul “Efektifkah kredit WIBAWA dikota Semarang?” dengan 4 narasumber, yakni pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Walikota Semarang, Pelaku UMKM, dan

pengamat ekonomi. Faktor yang membuat angka penerimaan bantuan dana kredit WIBAWA sangat kecil hanya 5.77% karena banyaknya pelaku UMKM yang belum mengetahui keberadaan program kredit WIBAWA dan keberadaan permasalahan pelaku UMKM dengan pihak Bank, keberadaan nama-nama pelaku UMKM yang dulunya bermasalah *diblacklist* namanya oleh pihak bank.

Pada tahun 2019 diketahui berdasarkan *Public Hearing* yang diadakan di ruang Sidang Paripurna DPRD, Kredit WIBAWA yang menjadi andalan Pemerintah Kota Semarang dikritik dan dikeluhkan oleh masyarakat yang mengikuti Kredit WIBAWA. Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang masih berbelit-belit dan dari jumlah anggaran yang disediakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan keberadaan nasabah yang mengurus kredit WIBAWA dengan waktu 2 bulan tetapi masih belum ada kepastian, kemudian dari nasabah lainnya juga mengalami permasalahan dimana pada awal dapat meminjam 5 juta tetapi pada tahap selanjutnya mengalami penurunan menjadi 4 juta. Permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa dalam hal ini Kredit WIBAWA perlu dilihat lebih mendalam terkait implementasinya kepada pelaku usaha mikro. (Mughis 2019)

Berdasarkan beberapa pokok pikiran sebelumnya, pokok permasalahan yang menjadi pembahasan utama yaitu apa yang membuat tingkat penerimaan dana dari pelaku usaha mikro yang mengajukan proposal kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang setiap tahunnya selain sedikit juga terus menurun, serta respon pelaku usaha mikro sangat sedikit dan jumlahnya terus menurun setiap tahunnya, hal ini bertolak belakang dengan jumlah pelaku usaha mikro di Kota

Semarang terus berkembang dengan pesat. Mengingat pentingnya penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kota Semarang maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pedurungan dengan mengambil judul: **“Implementasi Program Kredit WIBAWA (Wirausaha Bangkit Jadi Jawara) Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”**.

1.2.PERUMUSAN MASALAH

1. Mengapa implementasi program kredit WIBAWA (wirausaha bangkit jadi jawara) bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang belum optimal?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program kredit wibawa (wirausaha bangkit jadi jawara) bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis implementasi program kredit WIBAWA (wirausaha bangkit jadi jawara) bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi program kredit WIBAWA (wirausaha bangkit jadi jawara) bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara lebih mendalam dapat menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan hingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kebijakan publik.
- 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian, khususnya

tentang Implementasi program kredit WIBAWA (Wirausaha Bangkit Jadi Jawara) bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

b. Manfaat Praktis

1) Penulis

Keberadaan penelitian ini, penulis dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama ini di bangku kuliah dan menambah pengetahuan serta wawasan khususnya dalam pengembangan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2) Universitas

Menambah literatur dan informasi sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang selanjutnya berkaitan dengan pengembangan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

3) Pemerintah Kota Semarang

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan *good governance* terutama dalam bidang Usaha Mikro khususnya tentang Implementasi program Kredit WIBAWA bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

1.5.KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis / Judul / Sumber	Metodologi	Temuan	Perbedaan Penelitian
1.	Margunani. Avi Budi Setiawan. Nurjannah Rahayu Kistanti. Kajian Aksesibilitas UMKM dan IKM Terhadap Lembaga Keuangan di Kota Semarang. Jurnal UNNES, 2019	Metode Kuantitatif dan Kualitatif	Pada penelitian ini ditemukan beberapa indikator yang menjadi faktor penghambat pelaku usaha mikro mengakses program kredit WIBAWA / kredit perbankan, yaitu: a. Tingginya tingkat suku bunga b. Tidak memiliki tambahan angunan c. Tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit d. Prosedur dirasa cukup sulit e. Lemahnya manajemen keuangan f. Rendahnya kemampuan dalam pembukuan yang profesional (Margunani, Setiawan, and Kistanti 2019)	Lokus penelitian ini sama seperti lokus penelitian penulis, serta penelitian ini memiliki kemiripan dengan fokus penelitian penulis. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat pada penelitian penulis.
2.	Ayu Isrovani Pratiwi. Sundarso. Zaenal Hidayat.	Metode kualitatif	Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori menurut : Riant Nugroho. Implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan.	Fokus dan lokus penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis namun dengan teori yang digunakan dalam

	<p>Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta.</p> <p>Jurnal UNDIP, 2015</p>		<p>Sedangkan untuk faktor pendukung dan penghambat menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi, lingkungan sosial, ekonomi dan politik.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Implementasi program dilihat berdasarkan prinsip empat tepat Riant Nugroho (kebijakan, pelaksanaan, target, lingkungan) sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah no. 6 tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .</p> <p>Ditemukan faktor penghambat kebijakan antara lain: keterbatasan anggaran dana. Belum keberadaan peranan perusahaan swasta. Lingkungan sosial keluarga anak jalanan menyebabkan anak turun ke jalan. Lingkungan ekonomi Kota Yogyakarta menjadi daya tarik anak jalanan dari beberapa daerah.</p> <p>(Pratiwi, Sundarso, and Hidayat 2015)</p>	<p>penelitian ini sama dengan penelitian penulis. Maka penelitian ini menjadi masukan dalam proses pembuatan fenomena penelitian penulis.</p>
3.	<p>Reza Arista Saputra.</p> <p>Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar</p>	<p>Metode kualitatif</p>	<p>George Edwar III (dalam winarto, 2002: 126) ada 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Faktor komunikasi, dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi ada variabel : Transmisi, Kejelasan, Konsistensi b. Sumber daya c. Disposisi 	<p>Pada penelitian ini, fokus dan lokus penelitian berbeda dengan penelitian penulis, namun Indikator proses implementasi kebijakan yang digunakan pada penelitian ini dapat menjadi masukan dalam</p>

	<p>Pedesaan di Desa Sungai Paduan Kecamatan teluk Batang Kabupaten Kayong Utara</p> <p>Jurnal Universitas Tanjungpura pontianak, 2015</p>		<p>d. Struktur birokrasi</p> <p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Implementasi program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan di Desa Sungai Paduan belum efektif, karena:</p> <p>a. Komunikasi.</p> <p>Penyampaian informasi program infrastruktur dasar pedesaan belum disosialisasikan dengan jelas dan intensif kepada pelaksana progra ditingkat desa dan masyarakat.</p> <p>b. Sumberdaya.</p> <p>Belum didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya.</p> <p>c. Disposisi.</p> <p>Belum memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program.</p> <p>d. Struktur birokrasi.</p> <p>Terjadi model birokrasi tradisional, memiliki ketergantungan pada birokrasi tingkat atas, sehingga peran kepala desa sangat dominan.</p> <p>(Saputra 2015)</p>	<p>penyusunan fenomena penelitian penulis.</p>
4.	<p>Natalia Kusuma Dewi.</p> <p>Melly Anggraeni.</p> <p>Ida Hayu</p> <p>Dwimawanti.</p>	<p>Metode kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edwards III. Adapun variabelnya adalah:</p> <p>1. Komunikasi (<i>transmisi, kejelasan dan konsistensi</i>)</p>	<p>Fokus dan lokus penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sama</p>

	<p>Implementasi program bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Ngotet Kab. Rembang.</p> <p>Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, ISSN Online 2548-1363, vol 3 nomor 1. 2018</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. Sumber daya (sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan) 3. Disposisi (pengangkatan birokrasi dan <i>insentif</i>) 4. Struktur birokrasi (mekanisme dan struktur birokrasi). <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial pemugaran RTLH di Desa Ngotet Kab. Rembang belum maksimal karena beberapa faktor yang masih harus ditingkatkan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, faktor yang menjadi penghambat adalah kejelasan dan konsistensi pelaksana. 2. Sumber Daya, faktor yang menjadi penghambat adalah sumber daya manusia dan anggaran pendukung pelaksanaan program bantuan sosial pemugaran. 3. Disposisi, faktor yang menjadi penghambat adalah pengangkatan birokrasi dan insentif. 4. Struktur Birokrasi yang terdiri dari mekanisme dan struktur birokrasi ini sudah berjalan dengan baik karena sudah terdapat SOP dan kejelasan pola dalam pembagian tugas untuk pelaksanaan program bantuan sosial pemugaran rumah tidak layak huni di kabupaten rembang. <p>(Dewi, Anggraeni, and Dwimawanti 2018)</p>	<p>dengan penelitian penulis. Maka penelitian ini menjadi masukan dalam proses pembuatan fenomena penelitian penulis.</p>
--	--	--	---	---

5.	<p>Mandala Harefa.</p> <p>Masalah dan Tantangan implementasi program kredit usaha rakyat di Provinsi Selawesi Selatan dan Jawa Tengah</p> <p>P3DI, Kajian Vol. 20 No. 4 hal. 343 – 366, 2015</p>	Metode kualitatif	<p>Pada penelitian ini dapat ditemukan faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Provinsi Selatan dan Jawa tengah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. implementasi program KUR masih mengalami tantangan dilapangan, yakni banyak usaha kecil yang belum memperoleh fasilitas kredit, kondisi ini dapat jadi sosialiasasi kepada masyarakat/usaha kecil masih kurang dan sangat minim serta tidak rinci. b. Pada aspek penyaluran, bank-bank penyalur kesulitan menerapkan kriteria yang ditetapkan dalam program KUR. Hal ini terkedala beberapa ketentuan regulasi antara program KUR dengan pengelolaan perbankan. (Harefa 2015) 	<p>Fokus penelitian ini berkaitan dengan implementasi program kredit usaha rakyat dengan lokus dua tempat yang berbeda, sedangkan penelitian penulis merupakan implementasi program kredit WIBAWA, pada dasarnya fokus yang sama namun penamaan yang berbeda. Penelitian ini membantu penulis dalam penyusunan fenomena penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi.</p>
6.	<p>Noto Mashari Joyo.</p> <p>Efektivitas implementasi program gerakan membangun ekonomi rakyat lamongan berbasis pedesaan (GEMERLAP) di Desa Soko Kecamatan Glagah Kabupaten</p>	Metode Kualitatif	<p>Pada penelitian ini ditemukan indikator efektivitas program oleh Ripley dalam Erwan dan Dyah (2012):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akses b. Cakupan (<i>coverage</i>) c. Frekuensi d. Bias / penyimpangan e. Ketepatan layanan f. Akuntabilitas g. Kesesuaian program dengan kebutuhan <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan belum dapat menjalankan secara maksimal karena</p>	<p>Fokus dan lokus penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, namun teori yang digunakan dalam peneitian ini dapat membantu dalam penyusunan penelitian penulis.</p>

	Lamongan (2011-2015) Jurnal kebijakan dan manajemen publik Universitas Arlangga, vol 5 no 2. 2017		Akses yang didapatkan petani dalam menerima informasi yang diberikan pemerintah tidak sesuai dan hanya dilakukan dengan tempo waktu yang tidak menentu dan tidak terjadwal membuat penyuluhan kepada masyarakat petani kurang maksimal. (Joyo 2017)	
7.	Tien Yustini. Effectiveness of Poverty Reduction Program with Value Added Creation in Agribusiness Sector and Formulation of Strategic Plan and Policies International Journal of Economics and Finance; Vol. 10, No. 4; 2018	Metode kualitatif dan kuantitatif.	Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) variabel untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program pengentasan kemiskinan : 1. Tujuan program 2. Ketepatan target 3. Komunikasi 4. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program 5. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan model pemberdayaan petani untuk memungkinkan petani miskin berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan. Penguatan ekonomi sosial petani miskin adalah inti dari pemberdayaan petani dan akan optimal jika petani diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya pedesaan. Pengembangan ekonomi berbasis masyarakat berdasarkan institusi lokal Strategi mengembangkan pertanian rakyat dengan budaya industry. Serta penyediaan modal	Pada penelitian ini, fokus dan lokus penelitian berbeda dengan penelitian penulis. Namun ditemukan beberapa indikasi masalah yang cukup menyerupai dalam penelitian penulis. Akan tetapi dalam permasalahan, topic, dan di dalam penelitian ini pula tidak dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

			<p>melalui program kredit mikro untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang secara khusus menargetkan kaum miskin adalah strategi yang dianggap tepat untuk mengatasi kemiskinan.</p> <p>(Yustini 2018)</p>	
8.	<p>Yao Wang</p> <p>What are the biggest obstacles to growth of SMEs in developing countries? (An empirical evidence from an enterprise survey)</p> <p>ScienceDirect. 2016</p>	Metode kuantitatif	<p>Pada penelitian ini mengidentifikasi hambatan utama pertumbuhan dan faktor penentu bagi UKM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> akses permodalan (<i>access to finance</i>) Tingkat pajak (<i>tax rate</i>), Kompetisi (<i>competition</i>), Kelistrikan (<i>electricity</i>), Faktor politik (<i>political faktos</i>). <p>Hambatan terbesar yang dihadapi UKM ialah akses permodalan.</p> <p>(Wang 2016)</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda dengan penulis, namun dalam identifikasi masalah bagi pengembangan UKM ditemukan faktor dominan yang sama dengan penelitian penulis. Maka penelitian ini dapat membantu dalam analisis penelitian penulis.</p>
9.	<p>Neera Sherestha Pradhan. Yufang Su. Yao Fu. Liyun Zang. Yongping Yang.</p>	Metode Kualitatif	<p>Pada penelitian ini terdapat 5 indikator efektivitas implementasi program:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tujuan Program Perencanaan Pelaksanaan Program Kinerja Aktor yang Terlibat Evaluasi 	<p>Lokus dan fokus penelitian ini berdeda dengan penulis. Pada penelitian ini lebih menekankan dan menilai bagaimana kinerja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.</p>

	<p>Analyzing the effectiveness of policy implementation at the local level: A case study of management of the 2009-2010 drought in Yunnan Province China.</p> <p>International Journal of Disaster Risk Science. 2017</p>		<p>Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pemeliharaan air di Kabupaten Longyong Provinsi Yunnan China. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi petani tentang efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada jangka pendek, hasil langsung, dan nyata.</p> <p>Selain dukungan kebijakan pemerintah sebagai langkah cepat untuk mengatasi kekeringan, juga penting untuk mengurangi risiko dengan mengembangkan kesadaran yang lebih baik tentang perubahan iklim / kekeringan dan dampaknya, pemahaman bahaya kekeringan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk adaptasi jangka panjang.</p> <p>(Pradhan et al. 2017)</p>	
10	<p>Muhammad Amir. Rola Pola Anto.</p> <p>A study policy implementation of waste management in Konawe Regency-Indonesia.</p> <p>Journal of Sustainable Development vol. 11 no. 1. 2018</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan teori dari Edward III, bahwa implementasi kebijakan yang efektif dipengaruhi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur birokrasi <p>Hasil penelitian menemukan bahwa masih ada kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Konawe, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aspek fasilitas masih minim Kondisi wilayah kerja Kesadaran masyarakat 	<p>Fokus dan lokus dari penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Namun teori yang digunakan pada penelitian ini dapat membantu penelitian penulis.</p> <p>Terdapat masukan untuk analisis penulis pada hasil penelitian ini, bahwa kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat menjadi</p>

			d. Partisipasi masyarakat e. Pengetahuan yang rendah (Amir and Anto 2018)	kendala dalam sebuah impementasi kebijakan.
--	--	--	---	--

1.5.2. Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Menurut Herbert A. Simon dalam (Pasolong 2012:50) menjelaskan administrasi adalah kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Siagian dalam (Pasolong 2012:50) administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dwight Waldo dalam (Pasolong 2012:50) administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Jhon M. Pfiffner dan Robert V Presthus dalam (Mulyadi 2015:33) menjelaskan pengertian Administrasi Publik sebagai berikut: (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi 3 cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan Yudikatif. Serta hubungan di antara ke-Tiganya mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, serta merupakan bagian dari proses politik, sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan

dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat (Felix A. Nigro dan L. Lyod G. Nigro dalam (Pasolong 2012:08))

Berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara Negara.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Paradigma adalah corak berpikir seorang atau sekelompok orang. Thomas S. Khun dalam (Syafiie and Welasari 2015) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau suatu cara yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Di dalam beberapa kurun waktu tertentu cara pandang atau cara berfikir seseorang dapat mengalami perubahan, karena keberadaan penyesuaian terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Henry (Keban 2008: 31) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi publik, seperti diuraikan berikut ini:

1. Paradigma dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Paradigma ini menekankan bahwa pemikiran untuk memisahkan antara politik dan administrasi adalah sebuah strategi dalam pemerintahan untuk membuat pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemisahan

antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma tersebut adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government beraucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek lokus saja yaitu *government beraucracy*, tetapi fokus atau metode apa yang harus dikembangkan dalam paradigma administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma administrasi sebagai prinsip administrasi negara (1927-1937)
Paradigma ini berkembang dengan orientasi manajemen yang lebih sebagai ilmu pengetahuan. Paradigma ini meyakini bahwasanya prinsip administrasi dalam hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah. Gulick dan Urwick mendeskripsikan prinsip administrasi tersebut yakni dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgeting (POSDCORB)*.

Paradigma kedua ini menekankan pada pekerjaan, pelayan publik yang netral dan berkompeten dengan struktur hirarkis yang mencerminkan dengan apa yang menjadi tugas masing-masing. Paradigma ini juga diketahui membuat pemerintah menjadi lebih mandiri, mempunyai kontrol langsung, dan peningkatan akuntabilitas, keadilan sama rata, dan peningkatan pelayanan publik.

3. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini berkembang pada saat administrasi dengan manajemennya tidak dapat menangani permasalahan yang terjadi di administrasi publik, seperti halnya dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan kekuasaan politik dan manajemen tidak dapat menjangkau hal ini, akibatnya muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Sayangnya, mereka yang mengajukan kritikan terhadap administrasi tidak memberi jalan keluar tentang fokus yang digunakan dalam administrasi publik. Perlu diketahui bahwa pada masa tersebut administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Administrasi Publik sebagai ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini prinsip – prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam, kemudian pada tahun 1960-an muncul suatu pengembangan organisasi dalam ilmu administrasi sehingga ilmu administrasi publik pun segera mengikutinya. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu

administrasi murni yang didukung oleh ilmu psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetap juga dalam dunia administrasi publik. Karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

5. Paradima administrasi Publik sebagai administrasi Publik (1970- sekarang)

Paradigma ini muncul untuk menstabilkan perkembangan paradigma yang terjadi, Pernyataan dari Nicholas Henry membuat paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas dimana fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah – masalah kepentingan publik, urusan publik dan kebijakan publik. Penggunaan ilmu administrasi bisnis kedalam ilmu administrasi negara dan lokusnya kepentingan publik membuat penggunaan kata ilmu administrasi negara menjadi administrasi publik menjadi tepat.

6. Paradigma *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma ini berkembang untuk menyesuaikan perkembangan pemerintahan, Tamayao menjelaskan dalam (Ikeanyibe et al. 2017) menambahkan Paradigma *Governance*. Paradigma *Governance* keberadaan perkembangan untuk menyesuaikan pemerintah, dimana masyarakat dan swasta turut menjadi fokus utama dalam hal pelayanan. Paradigma ini menitikberatkan otoritas dari pemimpin politik untuk kesejahteraan masyarakat dan beberapa sektor masyarakat juga turut berperan dalam program atau kegiatan. Orientasi dari paradigma *Governance* mengatur urusan publik seperti keadilan, kepastian, partisipasi dan keterwakilan.

Berdasarkan penjelasan akan perubahan paradigma administrasi publik. Terkandung beberapa elemen penting yang terkait dengan pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga fokus administrasi publik, tidak hanya pada pemerintahan akan tetapi juga pada masyarakat secara umum.

1.5.4. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Anggara 2014: 35), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Edward dan Sharkansy mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah mencakup tujuan, maksud program pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Menurut (Mulyadi 2015) kebijakan publik adalah suatu proses yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholders* lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumberdaya yang ada untuk kepentingan bersama.

Menurut Anderson dalam (Agustino 2016: 17) Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Pengertian tersebut membawa pemahaman bahwa dalam kebijakan publik yang ada menyangkut kepentingan orang-orang yang terpengaruh didalam proses pengaturan sehingga dalam kebijakan publik haruslah memperhitungkan kepentingan antar stakeholder yang

terkait untuk dapat membuat kebijakan menjadi lebih pro kepada kepentingan masyarakat dan berdampak berkepanjangan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik karena sifat dari kebijakan yang mengikat, mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan yang terpenting terpenuhinya kepentingan publik.

Berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik, para ahli membaginya kedalam beberapa tahapan. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam (Winarno 2012: 35-37) yaitu:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Masing-masing alternatif dalam perumusan kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk

memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah

dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Berdasarkan definisi sebelumnya, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Definisi kebijakan publik dari para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan dan tindakan yang terarah yang dilakukan oleh aktor guna mencapai tujuan tertentu untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi, dimana persoalan tersebut melibatkan kepentingan publik.

1.5.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa dapat saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara 2014) Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara 2014) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino 2016: 128), implementasi kebijakan adalah Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Barret dalam (Agustino 2016: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Pendekatan implementasi ada tiga macam yaitu pendekatan atas-bawah (top down), pendekatan bawah-atas (bottom-up), dan pendekatan mix antara top-down dan bottom-up.

1. Pendekatan *Top-down* dalam (Anggara 2014: 234), pendekatan ini menitikberatkan kepada sudut pandang pembuat kebijakan dengan menyediakan prasyarat sukses sebuah implementasi yang telah dihitung dan dianalisis dengan cermat oleh pembuat kebijakan dan pelaksana tingkat atas (*High Level bureaucracy*), kebijakan akan lebih berhasil dalam implementasinya. Pendekatan ini melupakan peran pelaksana tingkat bawah yang pada kenyataannya lebih banyak berperan.
2. Pendekatan *bottom-up* dikomandani oleh Michael Lysky dalam (Anggara 2014: 234) Pendekatan ini proses politik tidak hanya berhenti saat kebijakan sudah diputuskan, tetapi juga tetap berlangsung pada level pelaksana tingkat bawah yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasi, perlu mempertimbangkan aspirasi, tujuan, dan kebutuhan para pelaksana, termasuk kesulitan yang dihadapi.
3. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (*Mix*) Dalam implementasi sebuah kebijakan pilihan yang paling efektif adalah jika dapat membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Model ini biasanya lebih dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan dan murah, bahkan dapat juga dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat *national security*. (Nugroho 2012)

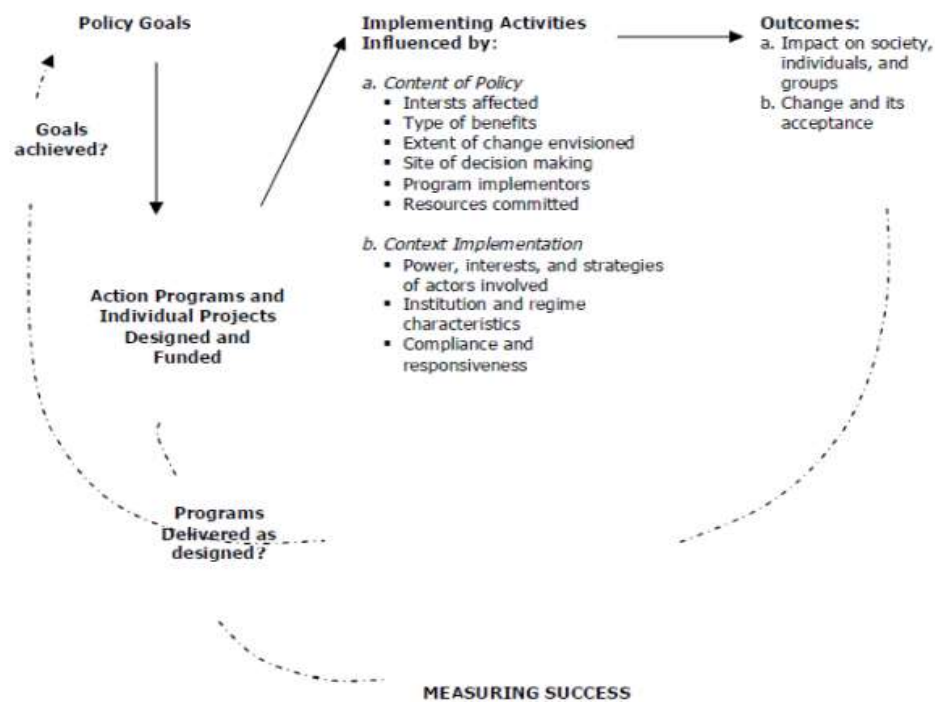
Implementasi Kebijakan memiliki beberapa model implementasi. Kegunaan model implementasi diantaranya untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Terdapat beberapa model implementasi diantaranya yakni:

a. Model Grindle

Keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam (Agustino 2016:142-145) dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes*, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan juga oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas konten dan konteks kebijakan.

1. Konten kebijakan, terdiri dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan.
2. Konteks kebijakan, terdiri dari kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan keberadaan respon dari pelaksana.

Gambar 1.2
Model Pendekatan *Implementation as A Political and Administrative Procces*



Sumber : Grindle dalam (Agustino 2016: 146)

b. Model Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino 2016: 133-135) menyatakan bahwa ada enam faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi termasuk juga sumber daya finansial. Apabila kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Karakteristik agen pelaksana ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap atau Kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

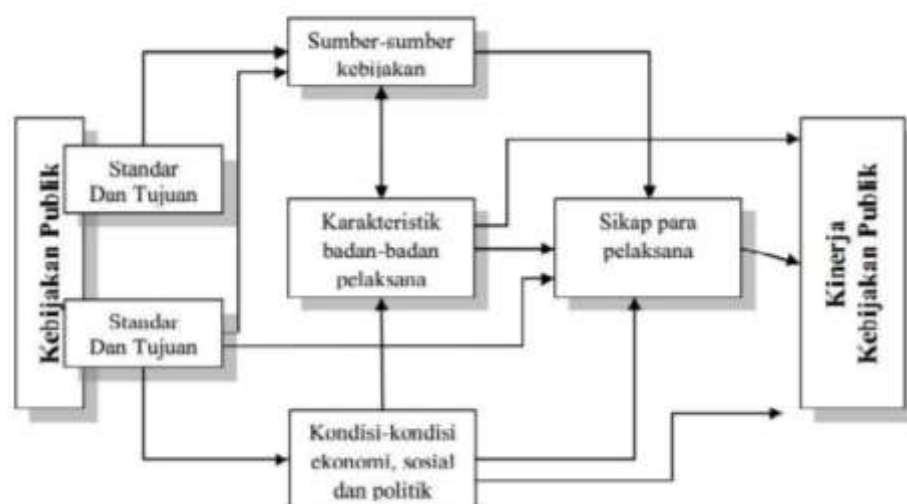
5. Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinator merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil untuk terjadi begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 1.3
Model Pendekatan *The Policy Implementation Process*



Sumber: Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016: 136)

1.5.6. Implementasi Program

Pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Keefektifan implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. (Nugroho 2012) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi program:

1. Tepat Pelaksana

Berkaitan dengan Implementator dari kebijakan, yakni pemerintah, kerjasama antar pemerintah, dan masyarakat, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

2. Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

3. Tepat Lingkungan

Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.

4. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

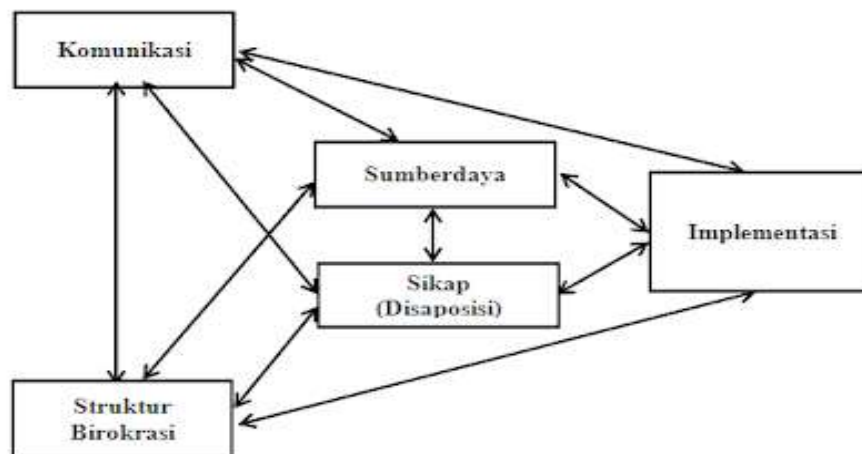
5. Tepat Proses

Secara umum implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu:

- a. *Policy Acceptance* disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- b. *Policy Adoption* disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c. *Strategic Readiness* disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan. Disisi lain *birokrat on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut pandangan George C. Edward III (Indiyahono 2017: 31-38), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 1.4
Model Implementasi Edward III



Sumber : Edward III dalam (Indiyahono 2017)

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program / kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari keberadaan distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas rogram maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukuan modal investasi atas sebuah

program / kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program / kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan sekeberadaan. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program / kebijakan. Tanpa keberadaan dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan / program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline program*. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam

guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin keberadaan pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

1.5.7. Kredit WIBAWA

Kredit WIBAWA merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang bermaksud pemberian kredit WIBAWA adalah sebagai salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kota Semarang kepada koperasi dan pelaku usaha mikro untuk mendukung upaya pengembangan usahanya. Kredit WIBAWA (Wirausaha Bangkit Jadi Jawara) merupakan bentuk dari dana bergulir yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Kredit WIBAWA diluncurkan pada tahun 2017 dengan mempunyai ciri khas bunga yang rendah sebesar 3 persen per tahun serta pembebasan agunan atau jaminan bagi pelaku usaha peminjam dana maksimal sebesar 5 juta, sedangkan selebihnya harus melalui jaminan dengan maksimal pinjam 50 juta. (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016)

Pinjaman dana bergulir adalah program pemberian pinjaman dana dari pemerintah yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro dengan bunga lunak bekerja sama dengan bank yang ditunjuk walikota dalam rangka memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro, yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke koperasi dan usaha mikro yang lain. (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016)

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang menyebutkan bahwa tujuan program kredit WIBAWA adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan koperasi dan pelaku usaha mikro dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
- 2) Meningkatkan peran koperasi dan pelaku usaha mikro dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat.
- 3) Memberi dukungan bagi warga masyarakat agar makin banyak menumbuh kembangkan semangat berwirausaha dan berkoperasi serta mendapatkan solusi ketiks mengalami masalah permodalan.

(Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang)

Besaran program kredit WIBAWA bagi pelaku usaha mikro menurut (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang) ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman sampai dengan setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dikenakan jaminan/angunan;

- 2) Pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikenakan jaminan / angunan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atau sertifikat tanah;
- 3) Pelaku usaha mikro yang belum melunasi pinjamannya, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi;
- 4) Pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan pinjaman dan telah mengangsur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian baik dari bank pelaksana maka dapat mengajukan pinjaman selanjutnya.

Persyaratan pengajuan kredit WIBAWA bagi pelaku usaha mikro menurut (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang) adalah sebagai berikut :

Pelaku usaha mikro yang sudah memiliki ijin usaha mikro mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada Walikota Semarang Cq. Kepala BPKAD, dilampiri :

- 1) Rencana definitif kebutuhan modal usaha;
- 2) Neraca keuangan;
- 3) Laporan laba/rugi
- 4) Kemampuan mengangsur;
- 5) Fotocopy Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- 6) Fotocopy KTP Kota Semarang;
- 7) Fotocopy kartu keluarga;
- 8) Pas foto berwarna suami istri ukuran 4x6 (2 lembar);
- 9) Surat kuasa kepada bank;

10) Surat pernyataan/Agunan (bagi pelaku usaha mikro yang mengajukan lebih dari Rp.5.000.000,-);

Sasaran pemberian program kredit WIBAWA adalah masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro. Penulis dalam penelitian ini lebih memilih pada sasaran Usaha Mikro bertujuan supaya fokus yang diteliti lebih dalam serta betasannya lebih jelas jika mengambil salah satu dari sasaran program.

1.5.8. Usaha Mikro

Pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 (UU No. 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan usaha mikro sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Kriteria kekayaan dan hasil penjualan, yaitu:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada pasal 7 ayat 2 (Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2016) menjelaskan usaha mikro yang dapat mengajukan Kredit WIBAWA adalah :

- 1) Warga Kota Semarang
- 2) Memiliki usaha produktif dan prospektif, paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- 3) Terdaftar sebagai pelaku usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Dibuktikan dengan kepemilikan NIB, IUMK yang didaftarkan melalui OSS).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Implementasi program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang merupakan kesesuaian antara fakta pelaksanaan di lapangan dengan konsep/rumusan tujuan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Implementasi program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diukur melalui fenomena sebagai berikut :

1. **Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan dapat dinilai dengan seberapa jauh kebijakan kredit WIBAWA dapat memecahkan masalah tentang pengembangan usaha, peningkatan kemampuan dari segi permodalan, mampu memberdayakan potensi ekonomi masyarakat dan menumbuhkembangkan semangat berwirausaha pelaku usaha mikro. Hal ini dapat dinilai dari :

1. **Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan merupakan tujuan program yang dilaksanakan dapat terwujud dan menyeluruh ke semua lapisan yang ada di masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan. Untuk

mengetahui pencapaian tujuan dari program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, peneliti melihat tujuan dari Program Kredit WIBAWA itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

2. Kejelasan Isi

Kesesuaian antara masalah yang dihadapi para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan dengan program kredit WIBAWA yang diluncurkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Melihat apakah masalah yang banyak ditemui oleh pelaku usaha mikro sudah terjawab dengan keberadaan program yang dikeluarkan beserta pelaksanaan programnya.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana dinilai dari peran ketiga pilar *good governeance*, yaitu :

1. Peran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Peran perusahaan daerah dalam berkontribusi terhadap kebijakan kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
3. Peran pelaku usaha mikro dalam mendukung kebijakan kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

3. Ketepatan Target

Ketepatan Target dapat dinilai dari respon Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan pelaku usaha mikro terkait cakupan pelaksanaan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

4. **Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan dapat dinilai dari lingkungan internal dan eksternal.

1. Lingkungan internal dapat dilihat dari interaksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai lembaga pembuat dengan BPR Bank Pasar Kota Semarang sebagai lembaga penyalur dana dari program kredit WIBAWA.
2. Lingkungan eksternal dapat dilihat dari interaksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan terkait pelaksanaan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

5. **Ketepatan Proses**

Ketepatan proses dapat dilihat dari :

1. Pemahaman pelaku usaha mikro terhadap program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
2. Penerimaan pelaku usaha mikro terhadap program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
3. Kesiapan pelaku usaha mikro sebagai bagian dari program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Faktor penghambat implementasi program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi

- 1) Metode yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengkomunikasikan program kredit WIBAWA bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- 2) Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada pelaku usaha mikro terkait program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- 3) Konsistensi Pemerintah dalam mengkomunikasikan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Disposisi

Disposisi dapat dinilai dari sikap demokratis Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan fungsi pelayanan dalam pelaksanaan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dinilai dari SOP pelaksanaan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

4. Sumber daya

Sumberdaya yang terlibat dalam implementasi program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, seperti sumberdaya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan program kredit WIBAWA dan sumberdaya lainnya.

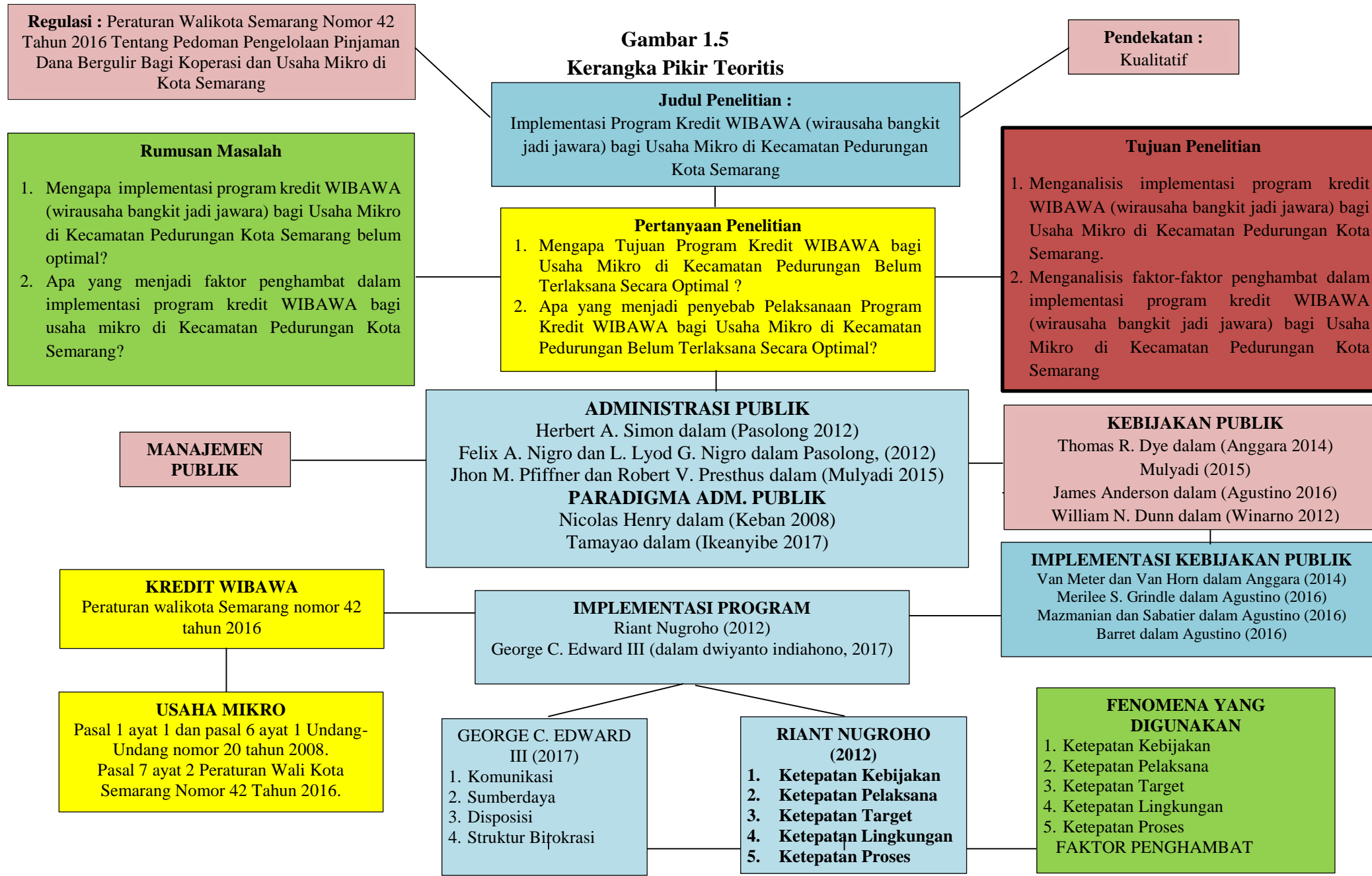
Tabel 1.7
Fenomena Penelitian

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
Ketepatan Kebijakan	Pencapaian Tujuan	Melihat sejauh mana kesesuaian antara tujuan program kredit WIBAWA dengan yang dilaksanakan kepada para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -wawancara -dokumentasi
	Kejelasan Isi	Melihat kesesuaian antara masalah yang dihadapi para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan dengan program kredit WIBAWA, melihat apakah masalah yang banyak ditemui oleh pelaku usaha mikro sudah terjawab dengan keberadaan program kredit WIBAWA.	Informan: -Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -Pelaku usaha mikro penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -Pelaku usaha mikro bukan penerima program Kredit WIBAWA. Cara pengumpulan data: -wawancara -dokumentasi -observasi
Ketepatan Pelaksana	Peran Pemerintah	Melihat peranan pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -wawancara -dokumentasi
	Peran Perusahaan Daerah	Melihat peranan BPR Bank Pasar Kota Semarang dalam berkontribusi terhadap program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan.	BPR Bank Pasar Kota Semarang. -dokumentasi
	Peran Pelaku	Melihat peranan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan dalam	-Pelaku usaha mikro penerima program

	Usaha Mikro	mendukung program kredit WIBAWA.	Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -Pelaku usaha mikro bukan penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -wawancara -observasi
Ketepatan Target	-	Melihat kesesuaian antara objek program kredit WIBAWA yang akan dituju dengan tujuan program kredit WIBAWA, dinilai melalui cakupan pelaksanaan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -wawancara -dokumentasi
Ketepatan Lingkungan	Lingkungan Internal	Melihat interaksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai lembaga pembuat dengan BPR Bank Pasar Kota Semarang sebagai lembaga penyalur dana dari program kredit WIBAWA.	-Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -BPR Bank Pasar Kota Semarang. -wawancara -dokumentasi
	Lingkungan Eksternal	Melihat interaksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan para pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan terkait pelaksanaan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan.	- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -Pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan. -wawancara -dokumentasi
Ketepatan Proses	Pemahaman Usaha mikro	Melihat pemahaman pelaku usaha mikro terhadap program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan mengenai manfaat yang akan diperoleh dan apa yang nantinya akan dicapai dari program kredit WIBAWA.	- Pelaku usaha mikro penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -Pelaku usaha mikro bukan penerima

			program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -wawancara -observasi
	Penerimaan Usaha Mikro	Melihat penerimaan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan terkait implementasi program kredit WIBAWA sebagai tugas bersama.	-Pelaku usaha mikro penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -Pelaku usaha mikro bukan penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -wawancara -observasi
	Kesiapan Usaha Mikro	Melihat kesiapan pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan dalam menjadi bagian dari program kredit WIBAWA.	-Pelaku usaha mikro penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -Pelaku usaha mikro bukan penerima program Kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan. -wawancara -observasi
Faktor Penghambat	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengkomunikasikan program kredit WIBAWA bagi Usaha Mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 2. Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota 	- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -Pelaku usaha mikro di Kecamatan Pedurungan. -wawancara -dokumentasi

		Semarang kepada pelaku usaha mikro terkait program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 3. Konsistensi Pemerintah dalam mengkomunikasikan program kredit WIBAWA di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	-observasi
	Disposisi	Melihat dari sikap demokratis Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan fungsi pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	-Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. -Pelaku usaha mikro -wawancara -dokumentasi -observasi
	Struktur Birokrasi	Melihat dari SOP pelaksanaan program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang -wawancara -dokumentasi
	Sumberdaya	Melihat dari sumberdaya yang terlibat dalam implementasi program kredit WIBAWA bagi usaha mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, seperti sumberdaya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan program kredit WIBAWA dan sumberdaya lainnya.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Pelaku usaha mikro -wawancara -dokumentasi -observasi



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode penelitian harus ditentukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitiannya agar memberikan gambaran serta arahan dan pedoman dalam penelitian. Menurut (Sugiyono 2016) mengungkapkan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dapat dijadikan pedoman bagi penulis dan memudahkan penulis dalam mengarahkan penelitiannya, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang akan dilakukan akan menyesuaikan kondisi lapangan sehingga lebih fleksibel dan dapat berubah-ubah, serta peran peneliti dalam melaksanakan penelitian sangatlah menentukan hasil data. Desain penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana dilakukannya penelitian dalam prosesnya serta dapat berjalan secara sistematis.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni menekankan kepada penggambaran terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga kata-kata dalam penggambaran lebih dominan dalam data yang dihasilkan. Penggambaran tentang realitas tersebut dapat menjadikan perspektif kita menjadi lebih luas sehingga dapat diketahui banyak hal dari apa yang telah diamati.

1.7.2. Situs Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai situs penelitian atau lokus penelitian, dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan kecamatan dengan jumlah dan perkembangan usaha mikro terbanyak di Kota Semarang, namun angka pencairan dana dan partisipasi pelaku usaha mikronya kecil.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian menurut (Arikunto 2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu informan menguasai masalah, memiliki data dan jawaban atas pertanyaan secara akurat (Sugiyono 2012: 218-219). Penelitian ini juga memungkinkan untuk menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan

data yang memuaskan, maka mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Informan yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
2. Pelaku usaha mikro penerima program Kredit WIBAWA
3. Pelaku usaha mikro bukan penerima program Kredit WIBAWA

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berwujud kata-kata atau pernyataan-pernyataan dan bukan merupakan rangkaian angka atau bersifat numerik.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan informan. Didalam penelitian ini informan yang digunakan sebagai data primer adalah informan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan para pelaku usaha mikro Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data ini berasal dari literatur seperti jurnal, artikel, skripsi, regulasi-regulasi, dan dokumen penting lain yang dapat digunakan serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Menurut Eterberg dalam (Sugiyono 2016: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dionstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dilakukan secara *face to face* terhadap responden yang dimaksudkan untuk mencari informasi ataupun fakta yang belum terungkap serta informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari setiap bahan tertulis dapat berupa dokumen atau laporan yang dihasilkan oleh pemerintah. Dokumen sebagai sumber data dalam hal ini berguna untuk mendapatkan informasi yang dapat diuji, ditafsirkan maupun gambaran akan permasalahan yang ada sepanjang berhubungan dengan fokus penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi juga suatu proses

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Pasolong 2012: 131). Keuntungan dari observasi yakni dapat diperoleh catatan perilaku yang sebenarnya. Apabila mengamati seseorang individu, maka akan memperoleh catatan apa sebenarnya yang dilakukan, bukan hanya dari apa yang ia pikirkan

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono 2016). Dengan kata lain reduksi data merupakan pemusatan atau penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan dilapangan. Data yang terkumpul kemudian disusun berdasarkan pokok masalah, kemudian direduksi dan dipilihah-pilah hal yang pokok, serta difokuskan kepada hal yang penting dan dicari tema atau plotnya.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah pemahaman terhadap apa yang terjadi dalam merencanakan pekerjaan berdasarkan apa yang telah terjadi.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono 2016: 252) adalah penarikan kesimpulan.

Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi obyek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7.8. kualitas Data

Untuk menilai kualitas data yang diperoleh valid dan berkualitas diperlukan teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data, maka dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi, menurut Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono 2012: 372-374) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga metode dalam menguji kredibilitas data, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, sehingga dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.